

**REVIEW 100 HARI KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO
TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK INDONESIA
DI MATA INTERNASIONAL**

Oleh :

Dahlan Panjaitan*

Email: dahlanp.92@gmail.com

CP: 082392955912

Dosen Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telpon/Fax. 0761-63277

Abstract

This research discusses the Jokowi 100 days as president. As president of the transition Jokowi got challenges and tests from the previous administration whether it economic and political problems. Challenges in the region emerged from the ASEAN economic community is also the challenge of the international community such as the World Bank, economic growth and diplomatic relations Indonesia.

For that Jokowi as transitional president of Indonesia should have and promote rational choices most priority to the interests of the nation. Therefore, this study uses analysis of rational choice theory and behavior, which is a qualitative research method. Indonesia is a big country and requires a lot of attention and care.

Therefore, measures taken by the government Jokowi considered relevant but also extreme for neighboring countries. Such a policy "sea toll", Asia shaft, sunk thieves alien fish, deportation, and other policies.

Key Words: Economic And Political Policies, President Joko Widodo, Governance Challenges, International Respons To Indonesian Government.

Pendahuluan

Dapat dikatakan 100 hari adalah waktu yang terlalu singkat untuk membuktikan kinerja pemerintahan Jokowi kepada publik. Karena Jokowi memimpin Indonesia untuk 5 tahun bukan 100 hari. Namun demikian menyoro 3 bulan pertama kinerja suatu pemerintahan lazim di gunakan sebagai evaluasi dini dan melihat pijakan dari arah kebijakan pemerintahan yang sedang berlangsung.

Dalam 100 hari kerja sebagai presiden sudah ada beberapa kebijakan Jokowi yang mendapat respon internasional¹. Seperti kebijakan poros maritim, kebijakan proteksi kelautan termasuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan, memulangkan TKI Indonesia di luar negeri, dan menegakkan kedaulatan hukum Indonesia di mata internasional serta kebijakan-kebijakan dalam negeri yang berorientasi keluar seperti menggenjot ekspor dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Sebagai anggota ASEAN, bahkan Indonesia disebut-sebut sebagai leader-nya ASEAN, tantangan ekonomi, arus teknologi dan tenaga kerja asing akan terlaksana. MEA akan mulai diterapkan pada tahun 2015. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun ini Indonesia harus menghadapi tantangan arus sumber daya manusia. Dengan adanya mobilisasi sumber daya manusia maka hal-hal yang akan tumbuh dalam iklim ekonomi Indonesia adalah;

1. Investasi
2. Produksi
3. Fluktuasi angka ekspor-impor
4. Menciptakan pasar-pasar baru

Hal-hal diatas adalah hal yang mungkin terbilang biasa dan sudah terjadi tetapi pertumbuhan investasi, produksi, angka ekspor-impor dan Indonesia dapat menciptakan pasar-pasar baru bagi produknya adalah tujuan partisipasi Indonesia ke dalam MEA². Disini poinnya adalah pertumbuhan.

Sebagai pemerintahan transisi Jokowi banyak mendapat berbagai tantangan. Baik itu tantangan yang muncul dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti masalah korupsi yang sudah menakar kuat di Indonesia, berbagai instansi terlibat dan menjadi sorotan. Korupsi adalah salah satu hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun penghambat pembangunan ekonomi-politik Indonesia secara komprehensif.

Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang keluar harus rasional seperti dalam Buchanan (1972)³, menjelaskan bahwa Teori Pilihan Rasional adalah teori ekonomi neoklasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat pada tindakan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen.

²Arifin, Samsul. dkk. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta; Elex Media Komputindo, 2008

³Disarikan dari Buchanan (1972) tentang Definisi teori pilihan rasional dan dipersepsikan oleh penulis.

¹100 hari kerja Jokowi-JK. Tersedia di <http://www.jurnalbandung.com/2015/01/26/100-hari-kerja-jokowi-jk-ini-kata-emil/>. Diakses pada 10 Januari 2015.

Jika demikian, maka kita harus melihat bagaimana Adam Smith, pengarang *The Wealth of Nation* (1776), menjelaskan bahwa “orang betindak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, melalui mekanisme “the invisible hand” menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat”.

Pembahasan

Pemerintahan Jokowi persis berada di dalam perubahan yang fundamental dari geo-politik global. Sejak Desember 2014, Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia menggeser Amerika. Hal ini telah diprediksi oleh dunia, menyebabkan medan ketegangan geo-politik akan bergeser ke Asia Pasifik. Dan ini ditandai oleh bergesernya 60% kekuatan militer Amerika ke kawasan Asia Pasifik⁴. Pertentangan utama kini terjadi antara Tiongkok (dan Rusia) dengan Amerika (dan Eropa)⁵. Tiongkok yang menyadari kini sebagai kekuatan utama dunia, mulai memperlihatkan giginya, lewat kepentingan maritimnya atas kawasan Laut Cina Selatan dan Jalur Sutra Maritim. Tiongkok dan Rusia juga semakin dekat, terutama lewat Shanghai Cooperation Organization (SCO) ataupun menandingi peran Bank Dunia dan IMF dengan inisiatif keuangan baru. Dan terpenting juga, kini Tiongkok menjadi kekuatan industri dan perdagangan utama dunia, dimana sebagian besar

⁴Inayati, Ratna Shofi. *33 Tahun ASEAN, Keberhasilan dan Kegagalan di Dalam Menuju ASEAN Vision 2020; Tantangan dan Inisiatif*. Editor; Ganewati Wuryandari. Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, 2000

⁵*Ibid.*

industri dunia berpusat dan diproduksi di Tiongkok. Demikian pula BRICS kini menjadi kekuatan dunia yang kuat, yang akan menjadi alternatif dari dunia lama (OECD ataupun G-8).

Di lain pihak perlu diwaspadai agresivitas Amerika yang merasa terancam karena digeser oleh Tiongkok, sehingga kini memusatkan perhatiannya pada Asia dan China. Perlu disimak adanya 13 basis militer Amerika yang mengelilingi kepulauan Indonesia, sejak dari Diego Garcia dan Christmas Island di Samudera Hindia, lalu di PNG dan Darwin di Australia, hingga Filipina dan Singapura di ASEAN. Demikian pula dengan menggunakan senjata instrumen keuangan dan minyak dunia yang dapat membuat ketidakstabilan global. Apalagi kepentingan Amerika dalam penguasaan pertambangan dan migas di Indonesia sangatlah besar dan tentu tidak mau dikurangi.

Indonesia tepat ada di tengah-tengah pertarungan geo-politik global tersebut. Karenanya naiknya Jokowi dan program-program berlandaskan Trisakti, lewat Nawa-Cita, Revolusi Mental, dan Poros Maritim Dunia adalah tepat waktu dan sesuai dengan perkembangan global. Karenanya semua program-program Jokowi tersebut haruslah dijalankan oleh orang-orang yang berideologi Trisakti. Yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Demikian pula tuntutan untuk mengawal program-program Nawa-Cita ini agar tetap di jalurnya dan konsisten sangatlah besar.

Pemerintahan Jokowi-JK dengan dasar pandangannya mengenai Trisakti dan penerapannya dalam Nawa-Cita, adalah sebuah upaya baru dari sebuah pemerintahan yang nasionalistis dan juga

demokratis. Hal ini sesuai dengan pokok-pokok pandangan yang juga disampaikan oleh Seknas Jokowi dalam "Jalan Kemandirian Bangsa".

1. Presiden Joko Widodo

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki *The New York Times* sebagai "demokrasi jalanan"⁶. Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi⁷.

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran

⁶ Cochrane, Joe (25 September 2013). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets". *The New York Times*. Diakses 15 March 2014.

⁷ Sholeh, Muhammad (19 Desember 2013). "Anies Baswedan sebut blusukan Jokowi cuma pencitraan". *Merdeka.com*. Diakses 15 March 2014

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management sistem.

2. Kebijakan Ekonomi-Politik Joko Widodo

Kebijakan Ekonomi

Sejalan dengan politik luar negeri Jokowi dalam menetapkan kebijakan ekonomi-politiknya, setidaknya ada dua hal yang menarik. Kedua hal tersebut adalah poros maritim dan diplomasi ekonomi. Poros maritim berusaha untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, untuk memajukan perekonomiannya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur kelautan, khususnya pelabuhan dianggap esensial agar Indonesia dapat mengembalikan kejayaannya, seperti pada masa Kerajaan Majapahit. Di lain sisi, diplomasi ekonomi berusaha untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara potensial. Diplomasi ekonomi dapat ditujukan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yang hingga saat ini masih belum menjangkau Indonesia Timur. Hal ini sangat perlu diperhatikan, mengingat ongkos logistik Indonesia cukup mahal dan tidak bersaing dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Diharapkan melalui diplomasi ekonomi, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8% seperti yang dicita-citakan.

Pada dasarnya kebijakan ekonomi Jokowi mencakup segala bidang perekonomian di Indonesia tetapi yang menjadi tolak ukurnya

adalah persentase dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan PDB hingga mencapai level 7-8 persen, namun menurut Lead Economist of World Bank, Ndiame Diop,⁸ mengatakan, reformasi pemerintahan Jokowi masih jauh dari kenyataan. Bahkan butuh kerja dan upaya yang sangat keras bagi Indonesia untuk bisa tumbuh hingga level 5,5 persen tahun ini. Menurutnya, perkiraan pertumbuhan PDB tahun 2015 hanya akan mencapai 5,2 persen dan meningkat tipis menjadi 5,5 persen pada 2016, tak berubah dari proyeksi akhir tahun lalu. Kedua, jika fundamental ekonomi Indonesia baik, tidak mungkin rupiah terpuruk terhadap dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah sebenarnya bisa dihindari apabila fundamental ekonomi Indonesia kuat. Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini semakin terpuruk, dan sempat diperdagangkan pada kisaran Rp 13.000 per dolar AS⁹.

Beberapa penyebab lemahnya perekonomian yaitu terkait dengan kebijakan untuk memperkuat daya saing yang masih kurang, diantaranya daya saing SDM dan daya saing produk-produk nasional. Padahal pasar bebas ASEAN akan mulai berlaku tahun ini. Jika ingin tetap bisa bersaing, Indonesia harus berbenah. Sebab, daya saing beberapa sektor industri utama kita masih kalah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015, Tahun ini, indeks daya saing global

(Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia masih berada di peringkat 34 dari 144 negara, Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-3110.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, masalah mendasar adalah fundamental ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. Persoalan di atas yang salah satunya terkait dengan pelemahan rupiah bisa disiasati dengan faktor internal yakni fundamental ekonomi yang kuat seperti bagaimana pemerintah mengatur perekonomian ini dengan kebijakan secara efektif, di antaranya pemerintah sebagai pemangku kebijakan, serta bagaimana kerjasamanya dengan BI sebagai otoritas moneter. Selain itu, memang penting untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor agar current account defisit bisa dikurangi, tapi juga mestinya dalam jangka pendek ini menjaga stabilitas sistem keuangan itu perlu menjadi prioritas karena akan sulit bagi suatu perekonomian untuk tumbuh berkembang jika stabilitas sistem keuangan terganggu. Dikuatkan oleh Al-Ghazali (2010: 253) bahwa, sangat diperlukan kebangkitan strategi-strategi ekonomi yang serius, berani, dan berpijak pada realitas, mewujudkan keseimbangan antara ekspor dan impor, dan memperhitungkan dengan jeli antara fase perkembangan sosial dan perekonomian dengan peluang-peluang yang bisa diraih masyarakat demi sebuah perubahan yang

⁸ dilansir dalam riaugreen.com (18/3/2015)

⁹ *ibid.*

¹⁰ Achsani, Noer Azam. *Integrasi Ekonomi ASEAN+3; Antara Peluang dan Ancaman*. The Brighten Institute. <http://brighten.or.id>.

diharapkan dan perealisasiian perdamaian sosial dan kemakmuran ekonomi serta stabilitas politik.

Kebijakan Politik

Kebijakan politik pemerintahan Jokowi-Jk sejalan dengan Visi-Misi pemerintahannya, yaitu¹¹:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.Kemudian upaya yang akan ditempuh dalam melaksanakan visi tersebut tertuang dalam misi berikut ini :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
 7. Mewujudkan masyarakat yang berkperibadian dalam kebudayaan
- Untuk 5 (lima) tahun ke depan ditetapkanlah 9 agenda prioritas yang disebut Nawa Cita yakni 12:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tidak kalah penting pula masalah politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi yang mengacu pada empat prioritas utama;

1 Mengedepankan identitas maritim dalam pelaksanaan diplomasi dan kerjasama internasional,

2 meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power,

3 memperluas mandala keterlibatan di kawasan Indo-Pasifik,

4 memperkuat diplomasi publik.

Politik luar negeri harus sejalan dengan kebijakan ekonomi politik internasional suatu

¹¹Visi-misi pasangan Jokowi-JK dalam www.kpu.o.id.Diakses 28Februai 2015.

¹²*Ibid.*

negara¹³. Hal ini merupakan suatu sinergi untuk memujudkan kepentingan nasional yang tercermin pada politik luar negeri maupun pada kebijakan ekonomi-politik internasional suatu negara. Kebijakan ekonomi sering kali di kaitkan dengan ideologi bangsa itu sendiri, dimana ideologi adalah ranah politik. Oleh karena itu ekonomi-politik merupakan garis berkesinambungan dalam mengatasi diskursus masalah sosial. Dapat dikatakan pula kebijakan luar negeri harus sejalan dengan politik luar negeri.

3. Respon dunia internasional terhadap kebijakan ekonomi-politik Jokowi

Di sela-sela menghadiri pertemuan APEC Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan Jokowi dengan tiga pemimpin negara itu membuktikan dirinya mulai diperhitungkan dunia.

Pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara yakni PM Abe, Presiden Obama, dan Presiden Putin berlangsung di sela-sela kehadiran Presiden di KTT APEC di Beijing, Tiongkok. Ketiga pemimpin negara itu memberikan penegasan akan arti penting Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan. Mereka juga menyampaikan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.

"Kedua negara sudah lama membangun hubungan dengan sikap saling membantu. Jepang sangat mementingkan hubungan dengan

Indonesia sebagai mitra strategis. Sebagai sesama negara maritim, kedua negara harus berkontribusi demi kedamaian dan keadilan," <PM Abe, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo, dari Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014)>.

Penegasan sebagai sesama negara maritim dari PM Abe itu menjadi kontekstual mengingat Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi berambisi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Tak hanya itu, Jokowi juga memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sisi lain, Tiongkok yang menjadi kompetitor Jepang di kawasan Asia Timur juga memiliki konsep Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21. Sehari sebelumnya, Minggu, Jokowi memenuhi undangan pertemuan bilateral dari Presiden Tiongkok Xi Jinping dan PM Tiongkok Li Keqiang.

Selanjutnya Abe menyampaikan, melalui investasi Jepang ke Indonesia, Pemerintah Jepang ingin berkontribusi di bidang industri dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tawaran itu pun disambut baik Presiden Jokowi mengingat Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk industri.

"Hubungan dua negara sudah saling mengisi dan saling percaya. Oleh karena itu, ke depan perlu dikembangkan dan diperluas agar lebih bermanfaat untuk negara dan rakyat Indonesia dan Jepang," <Jokowi, Presiden, Dikutip dari Kompas.com.>

a. Keamanan Maritim

Saat membuka pertemuan dengan Jokowi, Presiden Obama

¹³Pustaka.unpad.ac.id/.../ekonomi_sebagai_instrumen_politik_luar_negri.pdf

mengapresiasi pemilu dan transisi demokrasi di Indonesia serta toleransi dan pluralisme Indonesia yang menjadi contoh bagi dunia.

"Saya tahu Presiden Jokowi mempunyai agenda dan berambisi tentang pembaruan untuk membawa kesejahteraan rakyat Indonesia, dan AS ingin berpesan bahwa AS ingin menjadi mitra dan menjadi bagian dari pembaruan itu," <Obama, Presiden USA, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo, dari Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014)>

Pada kesempatan itu, Obama mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam hal-hal yang menyangkut permasalahan kawasan Asia Tenggara ataupun internasional. Sebagai pemimpin dalam ASEAN, Indonesia dipandang tetap memainkan peranan penting di kawasan, termasuk keamanan maritim. Amerika Serikat memandang penting adanya kebebasan navigasi dan ketaatan pada norma internasional serta penyelesaian sengketa secara damai. Asa akan stabilitas keamanan yang lebih baik juga disampaikan Presiden Jokowi.

"Kita ingin stabilitas keamanan kita lebih baik. Makanya, kerja sama di kawasan akan ditingkatkan, terutama di bidang keamanan," Jokowi, Presiden RI, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo, dari Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014)>

Pertemuan dengan Jokowi menjadi pertemuan bilateral pertama Obama dengan pemimpin negara lain yang hadir di KTT APEC di Beijing. Pertemuan bilateral itu digelar sekitar dua jam setelah Obama tiba di Beijing.

Saat membuka pertemuan bilateral dengan Jokowi, Presiden Putin lebih fokus pada kerja sama ekonomi yang sedikit menurun akhir-akhir ini. Namun, Putin memandang, kondisi itu lebih disebabkan perkembangan ekonomi dunia secara menyeluruh.

Saat mengikuti jamuan makan malam pemimpin ekonomi di KTT APEC, Senin malam, Jokowi berada tepat di sisi kanan Presiden Xi Jinping. Di sebelah kanan Jokowi ada Presiden Obama dan di sebelah kiri Presiden Xi duduk Presiden Putin. Jokowi menyadari posisi Indonesia yang menjadi rebutan negara-negara adidaya yang meminta bertemu dengannya, Senin. Meski tarikan kepentingan negara-negara itu terasa dalam pertemuan bilateral tersebut, dengan tegas ia menyatakan, posisi Indonesia tetap berada di tengah, bebas aktif, sesuai konstitusi Indonesia.

Presiden juga memanfaatkan forum APEC CEO Summit di Beijing untuk menawarkan peluang investasi pembangunan infrastruktur yang terkait konektivitas di Tanah Air. Sekitar 500 pemimpin perusahaan terkemuka dari 21 negara di Asia Pasifik tampak antusias dengan paparan Jokowi pada forum itu.

Dalam forum itu, Jokowi tidak berpidato dengan teks, tetapi menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris dan memanfaatkan slide layar lebar. Di situ ia menampilkan grafis peta Indonesia serta data statistik sebagai penunjang. Itu paparan perdana Jokowi di forum internasional sebagai Presiden.

Mengawali presentasinya, Jokowi memberikan gambaran tentang Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dengan populasi penduduk sekitar 240 juta jiwa.

Selanjutnya, ia menjelaskan agenda pembangunan di Indonesia ke depan yang fokus pada konektivitas maritim, pembangunan 24 pelabuhan dan transportasi massal kereta api, serta pembangkit listrik 35.000 MW.

Jokowi menggambarkan bagaimana konektivitas antarpulau belum terbangun dengan baik sehingga ada kesenjangan harga komoditas barang di antara pulau satu dan yang lain. Ia mencontohkan harga semen di Papua yang bisa mencapai 25 kali lipat harga di Pulau Jawa.

Selain memaparkan peluang yang ada, Jokowi jujur mengungkapkan adanya sejumlah masalah yang menghambat pembangunan di Indonesia, mulai dari birokrasi perizinan, pembebasan lahan, hingga ketersediaan listrik. Namun, ia juga berusaha meyakinkan kalangan usaha di Asia Pasifik, persoalan-persoalan itu akan menjadi fokus pembenahan dari pemerintahannya.

Mengakhiri presentasinya, Jokowi mengundang kalangan usaha di forum APEC untuk berinvestasi dalam pembangunan di Indonesia.

"Kami menantikan Anda untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi di Indonesia," <Jokowi, Presiden RI, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo, dari Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014)>.

Figur Jokowi cukup menarik perhatian para peserta APEC, karena dikenal dengan gaya pemimpin yang lugas, sederhana, apa adanya. Dia juga dikenal dengan gaya menyapa serta melihat pembangunan di masyarakat melalui blusukan.

Jokowi mengakui ada tarik-menarik kepentingan dari para pemimpin dunia untuk memberi

pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Namun, Indonesia tidak terpengaruh dengan tarik-menarik tersebut. Indonesia berada di tengah dengan menempatkan politik luar negeri bebas-aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Jokowi menyebut Indonesia menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Indonesia juga negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan berhasil menyelaraskan antara demokrasi dan Islam. Menanggapi ide kawasan perdagangan bebas Asia-Pasifik yang ditawarkan Tiongkok tetapi berlawanan dengan Trans Asia-Pasifik, Jokowi menegaskan tidak mau masuk ke satu kepentingan saja.

Indonesia memiliki strategi sendiri setelah berhitung dan berkalkulasi dengan produk-produk yang dimiliki Indonesia. Dengan mengedepankan identitas maritim, Indonesia dapat menjadi negara besar. Gagasan tol laut akan menjadi gagasan luar biasa menguntungkan bagi proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasama-kerjasama ekonomi dapat mulai di tumbuhkan dari gagasan pembangunan tol laut ini. Dengan pembangunan tol laut yang akan menghubungkan kelima pulau besar di Indonesia sangat membuka peluang bagi investor. Tidak hanya peluang investor yang akan terjadi tetapi juga sharing teknologi dan pengadaan persenjataan (untuk keamanan).

Gagasan tol laut ini juga telah di presentasikan oleh Jokowi dalam pertemuan APEC di Beijing, dan Jepang tertarik untuk ikut menjadi salah satu partner bagi Indonesia dalam proses pembangunan tersebut,

China pun merespon demikian, juga negara-negara lain seperti Rusia dan Amerika Serikat. Pada pertemuan itu presiden Jokowi juga membahas menengai poros Asia dimana konsep ini sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan tol laut yaitu konektivitas antar wilayah dapat dijangkau dengan mudah dan efisien¹⁴. Kekhawatiran muncul dari negeri-negeri tetangga. Analisis ASEAN, Prashanth Parameswaran untuk media *TheDiplomat.com* misalnya, melihat kebijakan luar negeri Indonesia tersebut sebagai (the trouble) “masalah”. Prashanth menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa politik luar negeri Indonesia itu akan cenderung jatuh pada sikap selfish dan egois. Penyebabnya arah kebijakan Indonesia dilihatnya terlalu dibuat “menyenangkan” untuk masyarakat dalam negeri, namun bukan untuk memperkuat persahabatan ke luar negeri¹⁵.

Keresahan itu muncul salah satunya disebabkan oleh kebijakan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu. Menteri Susi dengan tegas menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing ilegal. Namun, kebijakan itu dilihat oleh analis-analis mancanegara sebagai drama belaka karena Indonesia tidak cukup maksimal soal armada kelautan. Dengan merujuk pada pernyataan mantan Kepala Staf Angkatan laut Indonesia, Laksamana Marsetio *TheDiplomat.com* menyebut bawah angkatan laut Indonesia hanya memiliki dua kapal selam dan empat

kapal fregat, jauh dari jumlah yang dibutuhkan, 12 kapal selam dan 16 kapal fregat.

Kekhawatiran lain juga muncul terkait gagasan “Tol Laut” Indonesia yang akan menyabuk “Poros Maritim Dunia” besutan Tiongkok. Negara-negara tetangga pada satu sikap menyambut baik peluang investasi dari proyek raksasa itu karena dapat saja mereka turut serta ambil bagian. Namun, rasa optimistis itu disertai kecemasan bahwa, Indonesia dimungkinkan juga akan menambah investasi besar dalam bidang pertahanan dan kemandirian maritim sebagai syarat pengamanan investasi “Tol Laut”.

Sikap itu muncul berbekal situasi sebelumnya. Dalam forum bersama Kepala Angkatan Bersenjata ASEAN, ASEAN Chiefs of Defense Forces Informal Meeting (ACDFIM), akhir Desember 2014, mengusulkan perluasan anggota. Indonesia mengusulkan agar forum itu turut memasukan pemain kunci lain di Asia-Pasifik, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat (Amerika Serika). Usulan itu lantas menjadi sensitif, mengingat salah satu sengketa di ASEAN, yakni soal Laut China Selatan (LCS) masih menjadi beban beberapa negara, termasuk Malaysia dan Filipina¹⁶. Karena itulah, kekhawatiran atas kebijakan luar negeri Indonesia ataupun lawatan tiga negara Presiden Jokowi itu mendorong sebutan bahwa “Jakarta” akan kurang fokus membangun keseimbangan baru di ASEAN.

¹⁴Jokowi Kembali Beberkan Konsep Tol Laut, diakses di situs Tempo pada tanggal 25 mei 2014

¹⁵http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/05/110505_ekonomi.shtml

¹⁶ BBC Indonesia (2014) ‘Indonesia “lamban” Soal Isu Perbatasan dengan Malaysia’, BBC,

b. Poros Asia

Jakarta-New Delhi-Beijing-Seoul-Tokyo-Singapore. Itulah inti hubungan diplomatik Asia Jokowi. India dan Tiongkok dirangkul sebagai pasar dan pemodal untuk berinvestasi di Indonesia. Demikian pula Korea, Jepang dan Singapura didorong untuk tetap bekerjasama membangun perekonomian. Hal yang paling menonjol terkait hubungan dengan Singapura adalah alat kontrol izin terbang pesawat dan lalu lintas udara yang akan dipersoalkan Indonesia. Ini menarik. Selain itu, Jokowi masih ragu untuk menarik dana-dana yang diparkir di Singapura oleh para orang kaya di Indonesia termasuk oleh para koruptor yang bersembunyi di sana.

c. Bidang Investasi

Mulai tanggal 8 November 2014, Jokowi mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing, sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun¹⁷.

Kesimpulan

Banyak pihak yang memberikan takaran terkait

¹⁷Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014 dapat juga di baca dari sumber Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC. Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014.

perjalanan kepemimpinan Jokowi-JK selama 100 hari. Sepertinya, persoalan ini perlu dimaknai sebagai bentuk responsifitas warga bangsa dalam mengawal arah pembangunan dengan serangkaian perubahan kehidupan yang penting sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, banyaknya persoalan yang bergulir telah menjadi keharusan untuk bertemunya solusi yang konstruktif serta visioner. Tiada lain tujuannya ialah juga sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan segala potensi nasional agar produktif dengan daya saing dan karakter sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah pergaulan global.

Dalam 100 hari kerja Jokowi dapat dikatakan sebagai suatu perubahan bagi Indonesia. Melalui gaya kepemimpinannya yang pragmatis Jokowi dapat menyampaikan dan menerima aspirasi rakyatnya secara langsung¹⁸. Terlepas dari kritik baik atau tidak baiknya gaya kepemimpinan pragmatis ini, hal ini merupakan gaya komunikasi yang cukup unik dari seorang pemimpin. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".¹⁰⁰ Hari masa kepemimpinan Jokowi-JK belumlah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menakar kesuksesan perjalanan kepemimpinan nasional selanjutnya.

¹⁸Indrananto, Cahyadi (2012), *Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo / Local Leaders as Agents: Dramaturgy on Political Communications of City Mayor Joko Widodo of Solo*(abstrak dan PDF lengkap), Tesis Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Telah ada ketegasan untuk menegakan marwah kedaulatan nasional (national sovereignty). Terlihat jelas dari sikap dan tindakan untuk membangun kedaulatan pangan nasional (food security), maka salah-satu upaya konkret dengan sikap tegas terhadap illegal fishing melalui peneggelaman kapal yang kemudian menjadi model realisasi kebijakan yang dianggap elegan dan diapresiasi oleh sebagian besar warga bangsa. Namun kemudian kebijakan tersebut tetap berhadapan dengan resistensi komunitas nelayan nusantara dalam kaitannya dengan tangkapan yang selektif terkait industri perikanan tradisional. Maksud baik tersebut tentunya tetap akan diuji di lapangan ketika kebiasaan para nelayan dalam mengeksplorasi sumberdaya perikanan nusantara belum menemukan alternatif dan law treatment yang konstruktif. Oleh karena itu, perlu kebijaksanaan dalam melihat persoalan tersebut secara komprehensif.

Sehingga tupoksi Kementerian Kelautan dan Perikanan

jangan sampai tidak koordinatif dengan kementerian yang lainnya secara integratif yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, ketegasan dan kesadaran sektoral perlu dibina bukan ego sektoral dan overlapping. Kemudian, pengembangan sektor maritim/kelautan dan perikanan sesungguhnya di dalam koridor hukum harus berfokus pada industri perikanan dan menyediakan berbagai fasilitas serta infrastruktur yang mendukungnya. Selanjutnya juga diperlukan upaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi ketersediaan pelabuhan-pelabuhan perikanan alternatif, pengawasan baku mutu produk perikanan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya kebijakan ekonomi-politik Jokowi yang telah dan yang akan dilakukan ini seharusnya juga merupakan kebijakan yang arif, mensejahterakan rakyat dan pro perdamaian.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Indrananto, Cahyadi (2012), Pemimpin Daerah Sebagai Agen: Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo / Local Leaders as Agents: Dramaturgy on Political Communications of City Mayor Joko Widodo of Solo (abstrak dan PDF lengkap), Tesis Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Lidya Joyce Sandra, Political Branding Jokowi selama masa kampanye Pemilu ubernur DKI Jakarta 2012 di Media Sosial Tweeter. Jurnal E-Komunikasi Uniersitas Kristen Petra: Surabaya.
- Mansbaach, Richard W. dalam Nuraeni Suparman dkk, Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010
- Morgenthau, H. J. (2010) Politik Antarbangsa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 72
- Schonhardt, Sara (21 May 2013). "The Meteoric Rise Of Joko Widodo". The Global Journal. Diakses 15 March 2014.
- Wendt, Alexander. "The Agent Structure Problem in International Relations Theory" *International Organization* 41 (summer 1987) : 335- 370.

Buku :

- Arifin, Sjamsul. dkk. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global. Jakarta; Elex Media Komputindo, 2008.
- Bogdan, Robert C. dan Kopp Sari Biklen, *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*, (London, Allyn and Bacon, 1982).
- Direktorat Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta; Ditjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 1999.
- Farrel, Marry. "The Global Politics of Regionalism; An Introduction", dalam MarryInayati, Ratna Shofi.33 Tahun ASEAN, Keberhasilan dan Kegagalan di Dalam Menuju ASEAN Vision 2020; Tantangan dan Inisiatif.Editor; Ganewati Wuryandari.Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, 2000.
- Lindblom, E Charles, 1980. *Proses Penetapan Kebijakan* Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Ikbar, Yanuar Drs.MA. "Ekonomi Politik Internasional" implementasi konsep dan teori." Jakarta.

Krugman, R. Paul dan Maurice Obstfeld. 1993. Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Masoed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES.

Tatang M. Amirin. 2003. Pokok-pokok Teori Sistem. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Website:

Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014 dapat juga di baca dari sumber Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC. Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014.

100 hari kerja Jokowi-JK. Tersedia di <http://www.jurnalbandung.com/2015/01/26/100-hari-kerja-jokowi-jk-ini-kata-emil/>. Diakses pada 10 Januari 2015.

Cochrane, Joe (25 September 2013). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets". The New York Times. Diakses 15 March 2014.

Sholeh, Muhammad (19 Desember 2013). "Anies Baswedan sebut blusukan Jokowi cuma pencitraan". Merdeka.com. Diakses 15 March 2014.

Achsani, Noer Azam. Integrasi Ekonomi ASEAN+3; Antara Peluang dan Ancaman. The Brighten Institute. <http://brighten.or.id>.

Visi-misi pasangan Jokowi-JK dalam www.kpu.o.id. Diakses pada 28 Februari 2015.

Pustaka.unpad.ac.id/.../ekonomi_sebagai_instrumen_politik_luar_negri.pdf. diakses pada 30 April 2015.

Jokowi Kembali Beberkan Konsep Tol Laut, diakses di situs Tempo pada tanggal 25 mei 2014.

Indonesia laporan khusus ekonomi, http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/05/110505_ekonomi.shtml, diakses pada 12 Januari 2015.

